

Pendapatan Nasional Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Tania Arimbi

Institut Agama Islam Negeri Pontianak

taniaarimbi13@gmail.com

Informasi Artikel

E-ISSN : 3026-6874

Vol: 2 No: 9 September 2024

Halaman : 82-88

Abstract

National income in Islamic economics emphasizes the principles of distributional justice, halal economic activity, and attention to social welfare. Understood as the result of productive efforts that comply with sharia principles, national income is also integrated with the concept of zakat for the public interest and social welfare. By avoiding usury and speculation, and prioritizing favoring the weak, national income in an Islamic economy becomes a tool for achieving social, economic and spiritual goals that bring sustainable prosperity to the entire community. Descriptive for analyzing National Income from an Islamic Economic Perspective. Data is collected and relevant to the topic discussed. With this approach, the author presents comprehensive information about the concept of national income in the context of Islamic economics and highlights the importance of sharia principles in economic management. National income in a conventional economy is measured through a production, income and expenditure approach, especially with an expenditure approach such as the general GNP. However, criticism of this method highlights its shortcomings in accounting for equitable distribution of income and environmental impacts. In Islamic economics, sharia principles regulate economic variables such as consumption, investment, and international trade, with an emphasis on justice, community prosperity, and favoring the weak. Measuring economic welfare in Islamic economics also takes into account spiritual and humanitarian aspects. In Islamic economics, national income is considered the result of fair efforts and in accordance with sharia principles. The principles of distributional justice, avoidance of usury and speculation, and attention to the weak are the main foundations. Through a descriptive approach, this research provides an in-depth understanding of the importance of sharia principles in economic management.

Keywords:

Economy Islam

National

Income

Abstrak

Pendapatan nasional dalam ekonomi Islam menekankan pada prinsip-prinsip keadilan distribusi, aktivitas ekonomi yang halal, dan perhatian pada kesejahteraan sosial. Dipahami sebagai hasil dari usaha produktif yang mematuhi prinsip syariah, pendapatan nasional juga terintegrasi dengan konsep zakat untuk kepentingan umum dan kesejahteraan sosial. Dengan menjauhi riba dan spekulasi, serta memprioritaskan keberpihakan kepada golongan yang lemah, pendapatan nasional dalam ekonomi Islam menjadi alat untuk mencapai tujuan-tujuan sosial, ekonomi, dan spiritual yang membawa kemakmuran yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. Deskriptif untuk menganalisis Pendapatan Nasional dalam Perspektif Ekonomi Islam. Data dikumpulkan dan relevan dengan topik yang dibahas. Dengan pendekatan ini, penulis menyajikan informasi komprehensif tentang konsep pendapatan nasional dalam konteks ekonomi Islam dan menyoroti pentingnya prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan ekonomi. Pendapatan nasional dalam ekonomi konvensional diukur melalui pendekatan produksi, pendapatan, dan pengeluaran, terutama dengan pendekatan pengeluaran seperti GNP yang umum. Namun, kritik terhadap metode ini menyoroti kekurangannya dalam memperhitungkan distribusi pendapatan yang merata dan dampak lingkungan. Dalam ekonomi Islam, prinsip syariah mengatur variabel ekonomi seperti konsumsi, investasi, dan perdagangan internasional, dengan penekanan pada keadilan, kemakmuran masyarakat, dan keberpihakan kepada yang lemah. Pengukuran kesejahteraan ekonomi dalam ekonomi Islam juga memperhitungkan aspek spiritual dan kemanusiaan.

Dalam ekonomi Islam, pendapatan nasional dianggap sebagai hasil dari usaha yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip keadilan distribusi, penghindaran riba dan spekulasi, serta perhatian pada golongan lemah menjadi landasan utama. Melalui pendekatan deskriptif, penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan ekonomi.

Kata kunci : Ekonomi, Islam, Nasional, Pendapatan

PENDAHULUAN

Pendapatan nasional suatu konsep mendasarkan pada prinsip-prinsip etika dan keadilan dalam distribusi kekayaan dan sumber daya. Dalam ekonomi Islam, pendapatan nasional dipandang sebagai hasil dari usaha produktif dan adil yang mencakup aktivitas ekonomi yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip utama ekonomi Islam adalah keadilan dalam distribusi pendapatan, di mana pendapatan nasional harus didistribusikan secara merata di antara seluruh anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar serta meningkatkan kesejahteraan bersama (Lenny, 2021).

Produk Nasional Neto (PNN) adalah PNB dikurangi depresiasi atau penyusutan. Depresiasi mencerminkan penurunan nilai aset tetap akibat penggunaan dan usia. PNN memberikan gambaran yang lebih realistis tentang pendapatan yang dapat digunakan untuk konsumsi dan investasi, karena menghapus komponen yang digunakan untuk mengganti aset yang mengalami depresiasi. Dengan memahami ketiga indikator ini, kita dapat lebih baik menilai kinerja ekonomi suatu negara dan kesejahteraan masyarakatnya secara menyeluruh (Tambunan, 2022).

Dalam pengertian yang lebih luas, GDP mencakup semua pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan dan individu, tanpa memandang kewarganegaraan, yang beroperasi di dalam batas indikator utama yang memberikan gambaran tentang kesehatan ekonomi suatu negara. Pengukuran ini penting dalam menganalisis performa perekonomian, termasuk hubungan antara output, pendapatan, dan pengeluaran (Almizan, 2018).

Namun, GDP juga memiliki kelemahan, seperti tidak memperhitungkan distribusi pendapatan yang adil dan tidak memperhitungkan dampak lingkungan dari kegiatan ekonomi (Purwanto, dkk., 2021). Secara menyeluruh, karena tidak memperhitungkan faktor-faktor seperti kesehatan, pendidikan, dan kebahagiaan. Oleh karena itu, dalam mengevaluasi perekonomian suatu negara, penting untuk menggunakan indikator lain yang lebih holistik dan inklusif (Purwanti, 2020).

Perhitungan Gross National Product (GNP) sebagai indikator tingkat kesejahteraan seringkali menjadi objek kritik dalam perspektif ekonomi Islam, berkeadilan, dan berkelanjutan secara ekonomi. Dengan mempromosikan konsumsi yang bertanggung jawab dan bermanfaat bagi individu dan masyarakat, ekonomi Islam berusaha membangun fondasi ekonomi yang stabil dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Selain itu, prinsip ini juga berpotensi mempengaruhi perilaku konsumen untuk lebih sadar akan aspek moral dan spiritual dalam setiap transaksi ekonomi mereka, sehingga memperkuat nilai-nilai keadilan sosial dan keberkahan dalam kehidupan ekonomi sehari-hari (Hasan & Sahudin, 2022).

Konsep zakat dalam ekonomi Islam menjadi instrumen penting untuk memastikan distribusi kekayaan yang adil dan pemerataan kesempatan. Zakat bukan hanya sekadar kewajiban beragama, tetapi juga sebagai sarana redistribusi pendapatan yang memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain itu, ekonomi Islam menekankan pentingnya etika dalam berbisnis dan transaksi ekonomi, dengan prinsip-prinsip yang mengatur segala aspek kehidupan ekonomi dengan adil, jujur, dan tidak merugikan pihak lain (Rahman, 2015).

Pendekatan holistik ekonomi Islam juga memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam kegiatan ekonomi. Konsep *hifdz al-ma'ruf* (menjaga kebaikan) mengajarkan umat Islam untuk amanah dari Allah SWT. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dalam ekonomi Islam keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial yang menyeluruh (Tambunan, 2022).

Pendekatan ekonomi Islam menegaskan bahwa keselarasan antara kegiatan ekonomi dengan prinsip-prinsip syariah bukan hanya menghasilkan manfaat finansial, tetapi juga mempromosikan keadilan sosial dan kesejahteraan umum. Dengan memastikan bahwa semua aktivitas ekonomi

terpenuhi, diharapkan dapat tercipta lingkungan ekonomi yang stabil, berkelanjutan, dan memberikan dampak positif yang luas bagi seluruh masyarakat (Fadilla., 2017).

Ekonomi Islam menempatkan nilai-nilai moral dan spiritual sebagai fondasi utama dalam semua kegiatan ekonomi. Prinsip-prinsip seperti keadilan, kebersamaan, dan tanggung jawab sosial menjadi landasan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dalam konteks konsumsi, ekonomi Islam mengajarkan untuk menghindari pemborosan, kemewahan, dan kemubadziran, serta memprioritaskan konsumsi. Investasi harus mengikuti prinsip-prinsip syariah, dengan mengutamakan proyek-proyek yang memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas dan memperkuat kemandirian ekonomi umat (Apriliana, E. S. 2022).

Konsep zakat juga menjadi bagian integral dalam pemahaman pendapatan nasional dalam ekonomi Islam. Zakat yang berhak menerima, seperti fakir miskin, janda, yatim piatu, dan lainnya. Melalui zakat, pendapatan nasional umum dan kesejahteraan sosial (Syamsul, 2018).

Dalam perspektif ekonomi Islam, pendapatan nasional juga harus dihasilkan melalui aktivitas yang halal dan menjauhi segala bentuk riba, spekulasi, dan praktik-praktik ekonomi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini menggarisbawahi pentingnya keadilan dan kebersihan dalam menciptakan pendapatan nasional yang berkelanjutan dan berkah bagi masyarakat (Almizan, 2018).

Selain itu, pendapatan nasional dalam ekonomi Islam juga menekankan pentingnya kegiatan ekonomi yang memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu. Prinsip keadilan sosial dan keberpihakan kepada golongan yang lemah menjadi landasan dalam distribusi dan penggunaan pendapatan nasional dalam konteks ekonomi Islam (Tambunan, 2022).

Pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam bukan hanya sekadar ukuran kekayaan suatu negara, tetapi juga merupakan alat untuk mencapai tujuan-tujuan sosial, ekonomi, dan spiritual yang sesuai dengan ajaran Islam. Dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kebersihan, dan keberpihakan kepada yang lemah, pendapatan nasional dalam ekonomi Islam diharapkan membawa kemakmuran (Lenny, 2021).

Pendekatan holistik ekonomi Islam juga memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam kegiatan ekonomi. Konsep *hifdz al-ma'ruf* (menjaga kebaikan) mengajarkan umat Islam untuk amanah dari Allah SWT. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial yang menyeluruh (Hasan & Sahudin, 2022).

METODE

Peneliti menyajikan informasi yang komprehensif dan mendalam tentang konsep pendapatan nasional dalam konteks ekonomi Islam. Studi kepustakaan memungkinkan penulis untuk mengeksplorasi berbagai perspektif dan teori yang ada mengenai Pendapatan Nasional dalam konteks ekonomi Islam. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi baru terhadap literatur ekonomi Islam, terutama dalam hal pemahaman tentang hubungan antara konsep pendapatan nasional dan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Pendekatan deskriptif memungkinkan peneliti untuk menggambarkan fenomena yang ada dengan lebih rinci dan detail, tanpa melakukan interpretasi atau analisis yang mendalam. Hal ini penting untuk memperoleh pemahaman yang jelas tentang konsep Pendapatan Nasional dalam Perspektif Ekonomi Islam, sehingga dapat memberikan landasan yang kuat.

Dengan demikian, melalui metode studi kepustakaan dan pendekatan deskriptif, Perspektif Ekonomi Islam, serta memberikan sumbangan yang berharga bagi pengembangan teori dan praktik ekonomi Islam secara keseluruhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengukuran pendapatan nasional secara konvensional sangat penting dalam menganalisis kesehatan ekonomi suatu negara. Metode ini melibatkan beberapa pendekatan, termasuk pendekatan produksi, pendapatan, dan pengeluaran. Pendekatan yang paling umum digunakan adalah pendekatan pengeluaran, yang menghasilkan Gross National Product (GNP). Ini mencakup jumlah untuk (Almizan, 2018).

Dalam konteks ini, konsumsi rumah tangga memainkan peran penting, mewakili sebagian besar dari GDP, dan pendapatan rumah tangga, setelah dikurangi pajak, disebut pendapatan disposable (Tambunan, 2022).

Pemborosan, kemewahan, dan kemubadziran tidak dianjurkan. Pengeluaran pemerintah dalam ekonomi Islam juga harus dipertimbangkan dengan cermat, dengan mengutamakan kebutuhan masyarakat dan redistribusi yang adil (Lenny, 2021).

Selain itu, konsep zakat dalam ekonomi Islam menjadi instrumen penting untuk memastikan distribusi kekayaan yang adil dan pemerataan kesempatan. Zakat bukan hanya sekadar kewajiban beragama, tetapi juga sebagai sarana redistribusi pendapatan yang memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (Rahman, 2015).

Investasi adalah komponen kunci dalam pengukuran pendapatan nasional, yang mencerminkan keputusan perusahaan dan rumah tangga untuk berinvestasi dalam proyek-proyek yang dianggap menguntungkan (Purwanto, dkk., 2021). Keputusan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk tingkat bunga dan proyeksi potensi pengembalian investasi. Dalam konteks ini, variabel investasi memberikan gambaran tentang tingkat kepercayaan dan kestabilan ekonomi suatu negara. Tingkat investasi yang tinggi seringkali dianggap sebagai indikator positif dalam penilaian kinerja ekonomi (Syamsul, 2018).

Namun demikian, meskipun pendekatan konvensional ini memberikan gambaran yang luas tentang kondisi ekonomi suatu negara, terdapat juga kritik terhadap metode ini (Winda, 2016). Beberapa kritikus menyoroti ketidakmampuan metode ini untuk sepenuhnya memperhitungkan aspek-aspek seperti distribusi pendapatan yang tidak merata, dampak lingkungan, serta kualitas hidup secara keseluruhan. Oleh karena itu, sementara pendekatan konvensional tetap menjadi landasan utama dalam analisis ekonomi, penting untuk juga mempertimbangkan pendekatan alternatif yang lebih holistik dan inklusif dalam menilai kesejahteraan ekonomi suatu negara (Hasan & Sahudin, 2022).

Variabel belanja pemerintah merupakan elemen penting dalam pengukuran pendapatan nasional, yang mencakup pengeluaran untuk berbagai keperluan seperti jasa pegawai, pembangunan infrastruktur, dan transfer kepada rumah tangga. Pengeluaran ini secara langsung dapat meningkatkan pendapatan disposabel masyarakat, menggerakkan konsumsi dan investasi. Di sisi lain, dalam menghitung ekspor neto, nilai ekspor dikurangi dengan nilai impor dalam satu periode waktu. Meskipun demikian, dalam praktiknya, impor seringkali dijadikan faktor produksi dalam negeri, sehingga perhitungan yang akurat mengenai ekspor neto menjadi penting dalam mengukur performa ekonomi suatu negara (Apriliana, E. S. 2022).

Pendekatan konvensional dalam pengukuran pendapatan nasional, seperti Gross National Product (GNP), seringkali menjadi subjek kritik karena dianggap tidak mampu mencerminkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Kritik ini menjadi semakin relevan dalam konteks ekonomi Islam, di mana prinsip *falah*, atau kesejahteraan holistik yang mencakup aspek spiritual, menjadi pusat perhatian. Dalam perspektif ini, pengukuran kesejahteraan ekonomi tidak hanya ditinjau dari segi materiil, tetapi juga dari segi spiritual dan keadilan sosial, yang memerlukan pendekatan yang lebih holistik dalam pengukuran kinerja ekonomi (Fadilla., 2017).

Oleh karena itu, dalam mengevaluasi kinerja ekonomi suatu negara, penting untuk tidak hanya bergantung pada pendekatan konvensional semata. Perlu adanya penilaian yang lebih komprehensif yang mencakup aspek-aspek kesejahteraan yang lebih luas, termasuk aspek spiritual dan keadilan sosial (Purwanto, dkk., 2021), negara serta kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (Tambunan, 2022).

Dalam konteks ekonomi Islam, prinsip syariah menjadi panduan utama dalam mengatur variabel ekonomi kunci seperti konsumsi, investasi, belanja pemerintah, ekspor, dan impor (Winda, 2016). Konsumsi harus diarahkan pada barang dan jasa yang halal, dengan meminimalkan pemborosan dan perilaku konsumtif yang tidak produktif. Prinsip ini mempromosikan tanggung jawab sosial dan etika dalam penggunaan sumber daya ekonomi. Demikian pula, investasi dalam ekonomi Islam harus mematuhi prinsip keadilan dan kemakmuran masyarakat, serta menjauhi praktik riba dan spekulasi yang merugikan (Syamsul, 2018).

Ekonomi Islam dilihat sebagai bagian integral dari agama Islam yang mencakup semua mencerminkan nilai-nilai universal yang diturunkan dari ajaran Islam, seperti keadilan, kesetaraan, dan

tanggung jawab sosial. Hal ini mengarah pada sebuah pemahaman bahwa ekonomi dalam Islam bukan hanya tentang mencari keuntungan pribadi, tetapi juga tentang menciptakan masyarakat yang adil, berkeadilan, dan berkelanjutan secara ekonomi, sesuai dengan visi yang diperjuangkan dalam ajaran Islam secara menyeluruh (Lenny, 2021).

Kebijakan ekonomi yang didasarkan pada ajaran Islam juga mempertimbangkan keberlanjutan jangka panjang dalam mencapai kebahagiaan sekarang dan di masa depan. Hal ini berarti tidak hanya mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi saat ini, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap generasi mendatang dan lingkungan. Dengan demikian, kebijakan ekonomi Islam berupaya menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil, berkelanjutan, dan adil untuk semua pihak yang terlibat (Almizan, 2018).

pendapatan nasional dan pendapatan per kapita hanya memberikan gambaran sebagian dari kondisi ekonomi suatu negara. Faktor-faktor seperti distribusi pendapatan yang tidak merata, tingkat inflasi, struktur ekonomi, dan kebijakan ekonomi pemerintah juga mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, selain dari hanya melihat angka-angka agregat tersebut, analisis yang komprehensif tentang kondisi ekonomi suatu negara harus mempertimbangkan berbagai faktor lainnya kesejahteraan masyarakatnya secara menyeluruh (Hasan & Sahudin, 2022).

Dalam kerangka ekonomi Islam, pendekatan nasional harus diintegrasikan dengan nilai-nilai keadilan dan pemerataan yang ditanamkan oleh Islam untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (Fadilla, 2017).

Dalam perspektif ekonomi Islam, pengukuran kesejahteraan tidak terbatas pada aspek materi semata, tetapi juga mempertimbangkan dimensi spiritual, sosial, dan keadilan. Oleh karena itu, pendekatan pendapatan nasional dalam ekonomi Islam perlu memperhatikan beberapa aspek yang mencerminkan kesejahteraan yang holistik dan adil bagi seluruh masyarakat (Winda, 2016).

1. Penyebaran Pendapatan Individu Rumah Tangga

Pendekatan ini penting untuk memastikan distribusi pendapatan yang adil dan merata di antara individu-individu dalam masyarakat. Dalam ekonomi Islam, keadilan dalam distribusi kekayaan dan kesempatan menjadi prinsip utama. Oleh karena itu, pengukuran penyebaran pendapatan individu rumah tangga memberikan gambaran yang lebih jelas tentang sejauh mana keadilan ekonomi telah tercapai (Tambunan, 2022).

2. Produksi di Sektor Pedesaan

Sektor pedesaan memiliki peran penting dalam ekonomi Islam karena mencerminkan nilai-nilai kebersihan, keadilan, dan keberpihakan kepada yang lemah. Pengukuran produksi di sektor pedesaan memberikan gambaran tentang kesejahteraan ekonomi di daerah yang sering kali terpinggirkan. Hal ini memungkinkan untuk menilai efektivitas kebijakan ekonomi dalam memperhatikan kebutuhan pedesaan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat (Apriliana, E. S. 2022).

3. Kesejahteraan Ekonomi Islam

Pendekatan ini mencakup aspek-aspek, seperti keadilan dalam distribusi kekayaan, transparansi dalam transaksi ekonomi, dan tanggung jawab sosial. Pengukuran kesejahteraan ekonomi Islam memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang tingkat kemakmuran materi, spiritual dan sosial (Almizan, 2018).

4. Zakat

Redistribusi kekayaan yang adil dan pemberdayaan ekonomi umat. Pengukuran efektivitas pengumpulan dan pengelolaan zakat dan sedekah memberikan gambaran tentang upaya pemerintah dan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif (Hasan & Sahudin, 2022).

Pengukuran kesejahteraan dalam perspektif ekonomi Islam memerlukan pendekatan yang holistik dan tidak hanya terfokus pada aspek materi semata. Dengan memperhatikan aspek-aspek seperti penyebaran pendapatan, produksi di sektor pedesaan, kesejahteraan ekonomi Islam, dan zakat serta sedekah, tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Mardiantari, 2019).

Konsep zakat dalam ekonomi islam. Zakat bukan hanya sekedar kewajiban beragama, tetapi juga sebagai sarana redistribusi pendapatan yang memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (Arafin & Syamsun, 2020).

Selain itu, ekonomi islam juga memandang pentingnya pemberdayaan ekonomi umat melalui konsep mudharabah dan musyarakah yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi secara adil dan berkeadilan. Dengan demikian, ekonomi islam pemberdayaan ekonomi umat (Fadilla, 2017).

Pendekatan ekonomi islam juga menekankan pentingnya etika dalam berbisnis dan transaksi ekonomi. Hal ini tercermin dalam prinsip-prinsip ekonomi islam yang mengatur segala aspek kehidupan ekonomi, mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi. Dalam konteks ini, transaksi ekonomi harus dilakukan secara adil, jujur, dan tidak merugikan pihak lain (Aziz, 2017).

Pendekatan holistik ekonomi islam juga memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam kegiatan ekonomi. Konsep *hifdz al-ma'ruf* (menjaga kebaikan) mengajarkan umat islam untuk amanah dari Allah SWT (Apriliana, E. S, 2022).

Dengan demikian, tidak hanya diukur dari segi materi atau pendapatan semata, tetapi juga dari aspek keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial yang menyeluruh. Dalam konteks ini, pembangunan ekonomi islam bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kemakmuran material dan spiritual dalam masyarakat (Mardiantari, 2019).

Melalui pendekatan yang holistik dan berbasis nilai-nilai agama, ekonomi islam diharapkan mampu memberikan solusi atas berbagai permasalahan ekonomi dan sosial. Ekonomi islam bukan hanya menjadi alternatif, tetapi juga sebuah paradigma baru dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif (Purwanti, 2020).

Belanja pemerintah dalam ekonomi Islam harus didasarkan pada prinsip keadilan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan alokasi dana publik yang adil dan efisien, serta memprioritaskan penggunaan anggaran untuk program-program yang memberikan manfaat maksimal bagi seluruh masyarakat. Sementara itu, dalam perdagangan internasional, ekspor dan impor harus terbebas dari barang dan jasa yang dianggap haram menurut prinsip syariah, seperti alkohol, babi, atau senjata (Almizan, 2018).

Pengukuran kesejahteraan ekonomi dalam ekonomi Islam juga mencakup pertimbangan terhadap aspek spiritual dan kemanusiaan. Selain melihat indikator ekonomi konvensional seperti pendapatan dan konsumsi, pengukuran ini juga memperhitungkan tingkat kepuasan spiritual masyarakat, serta dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi (Aziz, 2017). Dengan demikian, pendekatan ekonomi Islam menekankan pada pencapaian kesejahteraan yang holistik, yang mencakup aspek material, spiritual, dan kemanusiaan secara seimbang (Apriliana, E. S. 2022).

Pada ekonomi Islam, konsumsi, investasi, belanja pemerintah, ekspor, dan impor harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Konsumsi harus mengikuti ketentuan halal dan tidak mewah. Investasi harus memperhatikan kemakmuran masyarakat dan menjauhi riba. Belanja pemerintah harus adil dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Ekspor dan impor harus terbebas dari barang dan jasa yang haram. Selain itu, pengukuran kesejahteraan ekonomi dalam ekonomi Islam juga mempertimbangkan pengaruhnya terhadap aspek spiritual dan kemanusiaan (Syamsul, 2018).

Dalam pandangan Islam, kesejahteraan tidak hanya terbatas pada kepuasan materi, tetapi juga memperhitungkan kebutuhan spiritual manusia. Oleh karena itu, semua aktivitas ekonomi dalam Islam diarahkan untuk memenuhi kebutuhan fisik dan rohani manusia (Aziz, 2017).

Pendekatan ekonomi Islam menekankan pentingnya keadilan, transparansi, dan keberpihakan kepada yang lemah dalam semua aspek kegiatan ekonomi. Konsep keadilan dalam distribusi kekayaan dan peluang adalah prinsip utama dalam ekonomi Islam, yang tercermin dalam pembagian zakat dan sistem keuangan syariah (Purwanti, 2020).

Selain itu, ekonomi Islam juga menekankan pentingnya akuntabilitas dan tanggung jawab sosial dalam semua transaksi ekonomi. Konsep mudharabah dan musyarakah dalam pembiayaan syariah mempromosikan kemitraan yang adil antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi (Apriliana, E. S, 2022).

Dalam ekonomi Islam, praktik bisnis yang tidak etis seperti riba, spekulasi, dan penipuan dikecam dan dilarang secara tegas. Prinsip-prinsip moral dan etika Islam harus diikuti dalam semua aspek kegiatan ekonomi untuk memastikan keberkahan dan keberlanjutan (Hasan & Sahudin, 2022).

Pendekatan holistik ekonomi Islam juga memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam kegiatan ekonomi. Konsep *hifdz al-ma'ruf* (menjaga kebaikan) mengajarkan umat Islam amanah dari Allah SWT (Apriliana, E. S. 2022).

Dengan demikian, ekonomi Islam menawarkan paradigma alternatif yang komprehensif dan berkelanjutan dalam mengelola kegiatan ekonomi, yang tidak hanya mencakup aspek materi tetapi juga spiritual, sosial, dan lingkungan hidup (Syamsul, 2018).

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat disimpulkan yaitu : dalam perspektif ekonomi Islam, pendapatan nasional dipandang sebagai hasil dari usaha produktif dan adil yang mencakup aktivitas ekonomi yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Konsep keadilan dalam distribusi pendapatan, penghindaran dari praktik riba dan spekulasi, serta keberpihakan kepada golongan yang lemah menjadi landasan utama (Aziz, 2017). Prinsip-prinsip tersebut menggarisbawahi pentingnya menciptakan pendapatan nasional yang berkelanjutan dan bermakna bagi masyarakat secara keseluruhan (Apriliana, E. S, 2022). Melalui pendekatan deskriptif dalam penelitian ini, informasi yang komprehensif dan mendalam tentang konsep pendapatan nasional dalam konteks ekonomi Islam prinsip-prinsip syariah (Purwanti, 2020).

REFERENCES

- Aji, D. K. (2021). Konsep Monopoli Dalam Tinjauan Ekonomi Islam. *Jurnal Adzkiya*, 1(1), 2013.
- Hasan, A. & Sahudin, D. (2022). Relevansi Pemikiran Tasawuf Syekh Nawawi Al-Bantani Dengan Ekonomi Islam. *Syifa al-Qulub : Jurnal Studi Psikoterapi Sufistik* Vol 7, No 1, 14-26.
- Lenny, (2021) Pengantar Ilmu Ekonomi. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Mardiantari, (2019) "Peranan Zakat, Infak Dan Sedekah (Zis) Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kota Metro (Studi Pada Lazisnu Kota Metro)" 17: 15.
- Purwanti, (2020) "Pengaruh Zakat, Infak, dan Sedekah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6 (1): 101.
- Tambunan, (2022). Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam. *Journal of Management and Creative Business*, 1(1), 63-71.